

**PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENSTABILKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA MELALUI
PENGENDALIAN INFLASI**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

NAZLY DAYANTY NASUTION

Nim: 54153057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENSTABILKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA MELALUI
PENGENDALIAN INFLASI**

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(D-III)
Dalam Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Oleh:

NAZLY DAYANTY NASUTION

Nim: 54153057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul **Peran Bank Indonesia (BI) Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 april 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 07 Mei 2018
Panitia sidang munaqasyah skripsi minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Ketua



Dr. Marliyah, M.A
NIP. 19760126 200312 2 003

Sekretaris



Kusmilawaty, S.E., M.Ak
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

Penguji I



Yusrizal, S.E., M.Si
NIP. 19750522 200901 1 006

Penguji II



Kusmilawaty, S.E., M.Ak
NIP. 19800614 201503 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 19760507 200604 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN BANK INDONESIA DALAM MENSTABILKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA MELALUI
PENGENDALIAN INFLASI

Oleh:

NAZLY DAYANTY NASUTION
NIM. 54153057

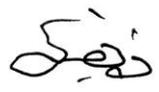
Menyetujui

PEMBIMBING



Yusrizal, SE, M.Si
NIP. 19750522 200901 1 006

Ketua Program D-III
Perbankan Syariah



Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 19760818 200710 1 001

IKHTISAR

Nazly Dayanty Nasution, Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi, Skripsi Minor D-III Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Peran Bank Indonesia dalam menstabilkan perekonomian Indonesia sangat menentukan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menekan inflasi banyak cara yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin dalam membantu perekonomian Indonesia agar tidak terjadi inflasi di suatu daerah. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung di dalam penelitian secara kualitatif deskriptif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia itu sendiri dalam menstabilkan perekonomian Indonesia melalui pengendalian inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Medan. Data yang diperoleh berupa data yang tertera secara resmi di situs Bank Indonesia itu sendiri mengenai tingkat inflasi dan mekanisme yang dilakukan Bank Indonesia dalam menstabilkan perekonomian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia itu sendiri sangat membantu dan sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi inflasi dan dalam membantu perekonomian masyarakat, dan memajukan perekonomian masyarakat, dan dapat melaksanakan perannya dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur bagi Allah swt. yang telah memberikan penulis kekuatan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul **“Peran Bank Indonesia (BI) Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi”**. Kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya.

Skripsi minor ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Diploma pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya tulis ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga skripsi minor ini dapat terselesaikan dengan baik, dan senantiasa memberikan keridhoan-nya dan mempermudah segalanya.
2. Rasa terima kasihku yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ibu dan Alm. Ayah, Hj. Fatimah, S.Pd,I dan (alm.) H. Sahnun Nasution, khususnya Ibu yang selalu melapangkan doanya untuk

penulis, serta untuk saudari-saudari kandungku Kakanda Aidah Nurul Fadhillah, S.Pd,I beserta suami Pandapotan Irawan, Nur Azizah, S.Pd beserta suami Hasta Tri Angga, dan Sazkiah Azmi, Am. Keb beserta suami Sulaiman, S.Pd yang selalu mendukung dan menyemangati penulis agar terselesaikannya skripsi minor ini.

3. Bapak Yusrizal S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi minor yang senantiasa memberikan petunjuk dan mempermudah dalam penulisan skripsi yang baik dan benar dan selalu mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sabar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Ibu Nurlaila Harahap, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Bapak Zuhrial M. Nawawi, selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Ibu Rahmi Syahriza, S. Thi., MA selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

11. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran kuliah.
12. Ibu Elly Sarianty selaku pembimbing magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang banyak membantu penulis.
13. Sahabatku Siti Nurhabibah Nasution yang turut membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan dan selalu menyemangati dalam penulisan skripsi minor ini.
14. Teman-teman seperjuangan Siti Marlina, Fitriani, Elida Hafni, Rapidah Batubara, Dara Chairunnisa, Ira Astuti, Nursyarifah Hidayati, Yulistya, Cikita Veronika, Ica Sentya Dewi, Ripase Nostanta, Ade Sundari, yang senantiasa memberikan tawa dan semangatnya kepada penulis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu terimakasih atas dukungan dan semangat kalian.
15. Teman-teman seperjuangan seangkatan DIII Perbankan Syariah stambuk 2015, khususnya teman-teman di kelas DIII PS-C.
16. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi minor ini penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan demikian adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan dari para pembaca, sehingga menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan

terima kasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kalangan khalayak umum. *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 07 Mei 2018
Penulis

NAZLY DAYANTY NASUTION
NIM: 54153057

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Metode Penelitian..... 10

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II : LANDASAN TEORI..... 14

A. Inflasi..... 14

B. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia 26

C. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia 30

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 38

A. Sejarah Singkat kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara..... 38

B. Visi Dan Misi Bank Indonesia 40

C. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara 41

D. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara..... 43

E. Uraian Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	60
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Kurva Terjadinya Demand Pull Inflation	20
2. Kurva Proses Cost Push Inflation	21
3. Logo Bank Indonesia	40
4. Tugas dan Produk Pokok Bank Indonesia	41
5. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	44
6. Data Inflasi Pada Dua Tahun Terakhir.....	55
7. Jalur Transmisi Kebijakan Moneters	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi suatu negara merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara tersebut. Dengan perekonomian, kita dapat mengukur dan menilai bagaimana perekonomian negaranya dan kita juga bisa melihat apakah suatu negara tersebut negara berkembang atau negara maju. Apabila suatu negara tidak dapat menyeimbangkan perekonomiannya, dampaknya akan menghancurkan negara tersebut dan sangat berpengaruh bagi perekonomian dunia.

Setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Pemerintah akan mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau indikator yang paling *representative* terhadap perubahan perekonomiannya.¹ Suatu negara dikatakan baik jika ekonominya bertumbuh, salah satunya dari segi pendapatan nasional riil-nya maupun dari segi pendapatan riil per kapita yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Perekonomian yang baik juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang terus menurun, artinya semakin banyak lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka masyarakat disuatu negara tersebut akan mengalami kesejahteraan dimana

¹ Ardra.biz, “Indikator Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara”, diakses dari <https://ardra.biz/ekonomi-makro/indikator-pertumbuhan-ekonomi-suatu-negara/>, pada tanggal 01 Maret 2018

tercukupinya segala kebutuhan baik dari kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Pertumbuhan industri juga akan berkembang pesat sehingga memungkinkan jika negara tersebut dapat menjadi negara maju.

Sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki perekonomian yang baik, maka dampak yang tidak bisa dihindari salah satunya yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang sering dialami suatu negara, khususnya Indonesia. Inflasi adalah penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dampak yang ditimbulkan pada perekonomian bisa berakibat pada ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat serta pengangguran yang tinggi.²

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.³ Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa juga menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.⁴

² Grebrory N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2001)

³ Bank Indonesia. "Pengenalan Inflasi", diakses dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengnalan/contentst/default.aspx> pada tanggal 01 Maret 2018

⁴ Badan Pusat Statistik. "Inflasi", diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html> pada tanggal 01 Maret 2018

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara *partner* dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) seiring dengan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan inflasi terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika.⁵

Faktor penyebab terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang dan atau karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang

⁵ Meita Nova Yanti. *Jurnal Ekonomi Bisnis: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia*. Vol. 21 No. 3. (Depok: Universitas Gunadarma, 2016)

terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik.⁶

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.⁷

Inflasi pada umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan sebagainya.

⁶ Ani Rahmani. “Faktor Penyebab Terjadinya Inflasi”. Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/faktor-penyebab-terjadinya-inflasi/>, pada tanggal 04 Maret 2018

⁷ Bank Indonesia. “Disagregasi Inflasi”, <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/content/disagregasi.aspx>, pada tanggal 04 Maret 2018

Dampak negatif inflasi dipasaran, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara memperlmainkan harga pasar, sehingga harga akan terus meningkat. Bila harga barang secara umum naik secara terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang kemudian memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna untuk membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush*, akibatnya bank kekurangan dana dan berpotensi tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

Namun, jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, maka produsen banyak yang akan mengalami kebangkrutan karena produknya yang relatif mahal sehingga tidak ada yang akan mampu membeli. Pendistribusian barang juga akan relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Hasilnya, jurang kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata dan mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.

Sedangkan dampak positifnya, inflasi lebih menguntungkan bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah *prestise*). Produksi barang-barang

bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah. Kesempatan kerja akan bertambah, karena terjadi tambahan investasi hal ini terjadi karena perusahaan memproduksi dan mengedarkan barang lebih banyak. Masyarakat juga akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan dan kesadaran untuk menabung masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan lebih menghargai uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

Untuk mengatasi inflasi, peran bank sentral dalam suatu negaralah yang merupakan kunci dalam menstabilkan ekonomi. Indonesia pernah mengalami kemerosotan ekonomi moneter pada tahun 1997-1998 ketika itu merupakan masa yang paling sulit yang pernah dialami oleh Indonesia karena ketidakstabilan dan pengangguran yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral-lah yang dapat membalikkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi.

Pemerintah menjaga inflasi agar tetap stabil melalui kebijakan moneter. Mekanisme pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dengan menetapkan tingkat suku bunga. Misalnya, pemerintah ingin menurunkan permintaan agregat, hal ini dilakukan dengan menaikkan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, maka *opportunity cost* untuk memegang uang tinggi, akibatnya

⁸ Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, konsumsi akan turun, permintaan agregat pun turun, dan inflasi dapat dikendalikan.⁹

Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga-harga barang secara umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi takaran inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengendalian Bank Indonesia. Untuk menjaga dan mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan pemerintah dan penawaran yang terjadi di pasar. Apa yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam.

Dalam perannya menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia selalu melakukan *assessment* terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan pada hasil *assessment* tersebut. Namun, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan melalui kebijakan moneter saja, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan disektor riil.

⁹ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 2016. *Pengukuran Inflasi Inti (Core Inflation) Di Indonesia*

Untuk mencapai sasaran tingkat inflasi yang rendah, Bank Indonesia menggunakan beberapa strategi, yaitu mengkaji efektifitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, dan memformulasikan respon kebijakan moneter. Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (*core* atau *underlying inflation*) sebagai sasaran operasional.¹⁰ Pencapaian sasaran inflasi juga memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia melalui kebijakan makro ekonomi yang terintegritasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) ditingkat pusat. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.¹¹

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-

¹⁰ Biro Hubungan Masyarakat, BI. *Peran BI Dalam Pengendalian Inflasi*. (Jakarta: 2003)

¹¹ Gerai Info Bank Indonesia. *Benang Merah 2015 edisi 57*. Juni 2015

sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi”.

B. Rumusan Masalah

Terjadinya inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi dalam suatu negara yang tidak bisa diabaikan, karena dampaknya sangatlah luas bagi negara itu sendiri maupun ke negara internasional. Upaya dan kebijakan pun akan dilakukan oleh pemerintah demi menstabilkan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme dan peran Bank Indonesia dalam melakukan stabilitas perekonomian Indonesia melalui pengendalian inflasi?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan juga pokok masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui mekanisme dan peranan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi Indonesia melalui pengendalian inflasi.”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan terhadap masalah ini. Beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, khususnya di dalam Bank Indonesia sendiri dalam menstabilkan peran perekonomian Indonesia melalui inflasi.
2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan pengetahuan tersebut baik dalam bangku kuliah maupun untuk studi secara mandiri.
3. Dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kasus ini diharapkan dapat membantu memberikan pemikiran ini, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi minor ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi hasil penelitian praktek kerja lapangan (magang) yaitu metode penelitian dimana penulis langsung kelapangan dan ikut serta untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan tulisan ini.
- b. Kajian pustaka atau kajian teoritis yaitu metode penelitian dimana penulis mengutip teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan lain-lain.

2. Sumber data yang dibutuhkan

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau dari sumber aslinya.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui pengolahan dari pihak kedua, dari hasil penelitian lapangan, atau referensi lain.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan angka. Kalaupun ada angka dalam penelitian ini hanya sebagai penunjang saja. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. *Editing*, yakni pemeriksaan kembali dari semua data terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. Dalam hal ini peneliti menyusun data-data yang

diperoleh dengan urutan profil Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan Pelaksanaan mekanisme pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis data-data tentang Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi minor ini dirancang secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran terdahulu, dan pemikiran teoritis.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi, tujuan, dan tugas dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Medan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN. Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan interpetasi hasil.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini diambil kesimpulan dari semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan diberikan saran yang dirasakan perlu untuk perbaikan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai suatu tendensi yang terus-menerus dalam meningkatnya harga-harga umum sepanjang masa.¹²

Angka inflasi adalah suatu indikator untuk stabilitas ekonomi selalu menjadi pusat perhatian tersendiri bagi para pelaku ekonomi. Jika tingkat inflasi yang tinggi sudah pasti akan membawa dampak yang merugikan bagi suatu negara. Keadaan perekonomian yang kurang menguntungkan (buruk) telah memacu tingkat inflasi yang tinggi dan akan menjadi malapetaka bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang juga naik. Sedangkan deflasi terjadi apabila harga-harga dan biaya-biaya secara umum turun.¹³

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga-harga lain.

¹² Sritua Arief. *Teori Ekonomi Mikro Dan Makro Lanjutan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

¹³ Paul A. Samuelson. *Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1993)

Jika seandainya harga-harga dari sebagian barang diatur pemerintah, maka harga-harga yang dicatat oleh Biro Statistik mungkin tidak menunjukkan kenaikan apapun karena yang dicatat adalah harga resmi pemerintah. Tetapi kenyataan yang terjadi ada kecenderungan bagi harga-harga untuk terus menaik. Dalam hal ini inflasi sebetulnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Keadaan ini disebut “*suppressed inflation*” atau inflasi yang ditutupi, yang pada suatu waktu akan terlihat karena harga-harga resmi semakin tidak relevan dalam kenyataan. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Dari pengertian tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya, tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi tetap dalam kecenderungan yang meningkat.
- 2) Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga – harga secara umum naik. Tetapi jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka hampir bisa dipastikan bahwa harga-harga komoditas lainnya akan ikut naik. Artinya, dengan naiknya harga BBM maka tarif angkutan akan naik yang pada gilirannya akan mendorong

¹⁴ Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)

naiknya biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga-harga barang/jasa lainnya.

- 3) Berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum juga akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, diantara faktor tersebut ada yang bersifat ekonomi namun bisa juga disebabkan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain:¹⁵

- 1) Meningkatnya kegiatan ekonomi sehingga mendorong peningkatan permintaan agregat namun tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.
- 2) Kebijakan pemerintah dibidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), listrik, air minum, menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan terhadap inflasi.
- 3) Melemahkan nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar menguat.
- 4) Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat, artinya ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga-harga barang.

¹⁵ M. Ridwan, dkk. *Ekonomi Pengantar Mikro Dan Makro Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2013)

2. Teori Inflasi

Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Namun demikian, ketiga teori tersebut bukanlah teori inflasi lengkap yang membahas semua aspek penting dari proses terjadinya kenaikan harga barang. Ketiga teori tersebut adalah Teori Kuantitas, Teori Keynes, dan Teori Strukturalis.¹⁶

a. Teori Kuantitas.

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Menurut teori ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga, yaitu sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif), terlalu banyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.

Teori kuantitas adalah teori yang membahas mengenai inflasi yang menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori kuantitas ini sebagai berikut:

- 1) Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral.

¹⁶ Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012)

- 2) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa mendatang.

b. Teori Keynes

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Karenanya teori ini dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

c. Teori Strukturalis

Teori ini menyoroti penyebab inflasi yang berasal dari kekauan struktur ekonomi, khususnya kekuatan *supplay* bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kenaikan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

3. Jenis-jenis Inflasi

Jenis-jenis inflasi dapat digolongkan menjadi tiga jenis/bagian yakni sebagai berikut:¹⁷

1) Inflasi Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa kategori utama. *Pertama*, Inflasi Ringan (*creeping inflation*) yaitu inflasi dibawah 10% pertahun. *Kedua*, Inflasi Menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10 – 30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya. *Ketiga*, Inflasi Berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30 – 100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu rumah tangga harga berubah. *Keempat*, Inflasi Sangat Tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang di tandainya oleh naiknya harga secara drastis sehingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

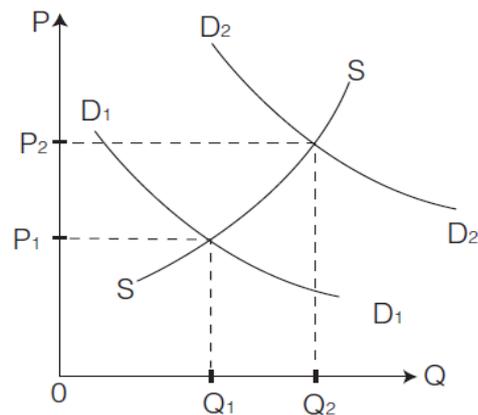
2) Inflasi Menurut Sebabnya

Inflasi menurut sebabnya dapat dikategorikan menjadi 2. *Pertama*, Inflasi Penarikan Permintaan (*demand pull inflation*) yaitu, inflasi yang timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disuatu pihak, dipihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara

¹⁷ Iskandar Putong. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang bertambah terlalu kuat akibat tingkat harga umum naik (misalnya karena bertambahnya pengeluaran perusahaan).



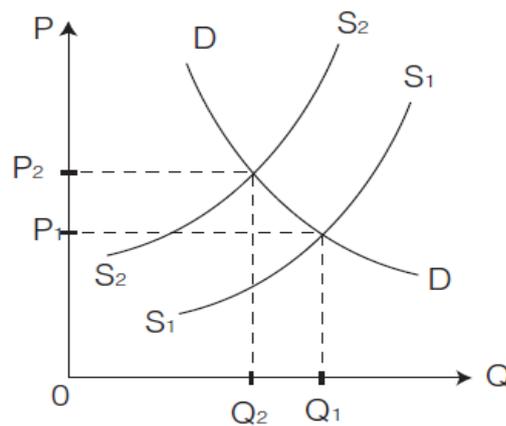
Gambar 1. Kurva terjadinya *Demand Pull Inflation*

Sebagaimana dalam gambar, perekonomian dimulai pada P_1 dan tingkat *output* riil dimana (P_1, Q_1) berada pada perpotongan antara kurva permintaan D_1 dan kurva penawaran S . Kurva permintaan bergeser keluar D_2 , pergeseran seperti itu dapat berasal dari faktor kelebihan pengeluaran permintaan.

Pergeseran kurva permintaan menaikkan *output* riil (dari Q_1 ke Q_2) dan tingkat harga (dari P_1 ke P_2) maka inilah yang disebut *demand pull inflation* (inflasi tarikan permintaan) yang disebabkan pergeseran kurva permintaan menarik ke atas tingkat harga dan menyebabkan inflasi.

Kedua, Inflasi Dorongan Biaya (*cost push inflation*) yaitu, inflasi yang disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen yaitu, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang serta turunnya produksi (misalnya kenaikan harga barang baku yang didatangkan dari luar negeri dan kenaikan harga BBM).



Gambar 2. Kurva Proses *Cost Push Inflation*

Pada gambar diatas menunjukkan perilaku produsen ketika menghadapi situasi dimana harga produksi mengalami peningkatan. Ketika terjadi kenaikan harga produksi maka produsen akan menaikkan harga dari P_1 ke P_2 tetapi produsen justru akan menurunkan jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari Q_1 ke

Q2, sehingga akan menggeser kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Hal ini dilakukan agar produsen tidak terus merugi sambil menunggu harga produksi kembali turun.

3) Inflasi Menurut Asalnya

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi dua. *Pertama*, inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam dan sebagainya.

Kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produktif relatif mahal, sehingga negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.

4. Inflasi Dalam Perspektif Islam

Islam tidak mengenal inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Syekh An Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai. Beberapa diantaranya adalah:¹⁸

- 1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.

¹⁸ Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

- 2) Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang.
- 3) Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak.
- 4) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin terjadi yaitu ketika nilai emas menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dengan jumlah yang besar tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Ekonomi Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M – 1441 M), yang merupakan salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*.

1) *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya *natural inflation*, inflasi ini disebabkan oleh sebab alamiah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat, orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegahnya).

Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut: gangguan terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misalnya barang dan jasa turun, sedangkan jumlah uang yang beredar dan kecepatan uang yang beredar tetap, maka konsekuensinya tingkat harga akan naik. Naiknya daya beli

masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga secara *netto* terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang beredar naik, sehingga jika kecepatan peredaran uang dan tingkat harga tetap, maka tingkat harga akan naik.

Keseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah tidak mau menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga, ini sesuai dengan hadist, *Anas meriwayatkan*, ia berkata: *orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami”*. Rasulullah SAW lalu menjawab, *“Allah-lah penentu harga, penahan, pembentang, dan pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta.”*

2) *Human Error Inflation*

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri seperti yang tertulis dalam Q.S Ar-Rum ayat 41, yakni:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Adapun beberapa penyebab yang dimaksud dalam firman Allah tersebut diantaranya adalah:

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and a bad administration*)
- 2) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*). *Excessive tax* dapat mengakibatkan terjadinya *efficiency loss* atau *dead weight loss*.
- 3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

Pakar ekonom Islam, Al-Maqrizi berpendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga umum (inflasi). Kenaikan harga komoditi tersebut adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang (*fulus*) atau nominal, sedangkan jika diukur dalam emas (dinar emas) maka harga komoditi tersebut jarang sekali mengalami kenaikan.

Inflasi memiliki pengaruh yang buruk bagi perekonomian karena:¹⁹

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan). Orang harus melepaskan uang dan aset keuangan akibat beban dari beban inflasi tersebut.
- 2) Melemahkan semangat menabung masyarakat.
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk belanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah.
- 4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan, seperti: tanah, bangunan, logam mulia, dan

¹⁹ M. Ridwan, dkk. *Ibid*

mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

B. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia

1. Dampak Inflasi

Selama ini ada pandangan bahwa inflasi selalu berbahaya bagi perekonomian karena inflasi menurunkan daya beli masyarakat dan juga cermin dari instabilitas perekonomian yang berujung delimitasi kekuasaan politik. Delimitasi kekuasaan politik akan berujung pada lengsernya sebuah pemerintah. Banyak pemerintahan jatuh hanya gara-gara gagal mengendalikan inflasi.

Pandangan tersebut tidaklah selalu benar. Inflasi dalam kadar ringan dibutuhkan, sedangkan inflasi dalam kadar berat barulah merugikan. Inflasi yang berbahaya bagi perekonomian adalah inflasi berat dan hiper inflasi. Sedangkan inflasi ringan sampai inflasi sedang justru dibutuhkan dalam sebuah perekonomian. Karena dengan inflasi ringan dan sedang ada insentif bagi dunia usaha atau bisnis untuk terus menjalankan bahkan memperluas bisnisnya. Jika yang terjadi adalah deflasi (penurunan harga) maka hal itu justru menunjukkan kelesuan ekonomi dan merupakan disinsentif bagi dunia usaha atau bisnis.

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat

dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya.²⁰

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus juga menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak negatif inflasi terhadap individu dan masyarakat salah satunya adalah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli menjadi berkurang atau malah semakin rendah, terlebih bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil bagi individu yang berpendapatan tetap.

Inflasi juga akan memperburuk distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Dampak lainnya dapat dirasakan pula oleh para penabung, kreditor atau debitor, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan

²⁰ Iskandar Putong. *Ibid*

orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang yang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat membayarkan utang kepada debitur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau yang dipinjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian uang lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Begitu pun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana

jangka panjang para pelaku ekonomi. Jika inflasi tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat.²¹

2. Efek Yang Ditimbulkan Inflasi

Inflasi dapat menimbulkan beberapa efek bagi perkembangan perekonomian Indonesia, diantaranya sebagai berikut:²²

1) Efek Terhadap Pendapatan (*equity effect*)

Seseorang yang berpendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi. Misalnya seseorang yang berpendapatan tetap Rp. 60.000.000,00 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%. Bila penghasilannya tidak mengalami perubahan, maka ia akan mengalami penurunan pendapatan riil per tahun sebesar $10\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000$ per tahun. Di pihak lain ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi, yaitu orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi dan mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang atau emas.

2) Efek Terhadap Efisiensi (*efficiency effect*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Dan akan berpengaruh pada proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi dan

²¹ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2008)

²² Naf'an. *Ibid*

perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang.

3) Efek Terhadap Output (*Output Effect*)

Dalam menganalisa kedua efek diatas (*equity dan efficiency effect*) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu.

4) Efek Inflasi Terhadap Pengangguran

Suatu negara yang berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi, berarti pada saat yang sama akan menciptakan pengangguran.

5) Efek Inflasi Terhadap Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud.

C. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia

1. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Mewujudkan inflasi nol persen secara terus-menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah hal yang sulit dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada

pada tingkat yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi sebab terjadi atau tidaknya inflasi tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.²³

1) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaiki penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal ini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran, yaitu:

a. Kebijakan fiskal dari segi teori.

Kebijakan fiskal dari segi teori dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

i. Kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang

²³ Nurul Huda, dkk. *Ibid*

dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.

- ii. Kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah.
- iii. Kebijakan fiskal yang tak disengaja dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran.

b. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran

Kebijakan fiskal dari segi jumlah penerimaan dan pengeluaran digolongkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- i. Kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya.
- ii. Kebijakan fiskal surplus, yaitu kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
- iii. Kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran.

- iv. Kebijakan fiskal dinamis, merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu keduanya akan bertambah besarnya.

2) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, bank sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka, atau bank sentral menurunkan tingkat diskonto, yang harus dibayar oleh bank jika hendak meminjam ke bank sentral. Akan tetapi, apabila ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi menjadi masalah yang semakin besar, maka bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka (*open market operations*), menarik uang dari sistem perbankan, menaikkan persyaratan cadangan minimum (*reserve requirements*), atau menaikkan tingkat diskonto (*interest or discount rate*), sehingga dengan demikian akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Instrumen kebijakan moneter antara lain yaitu, *Pertama*, Kebijakan operasi pasar terbuka (*open market operation*) yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang sedang beredar dimasyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau juga bisa juga dengan membeli atau menarik surat-surat berharga yang beredar di pasar modal. Lelang sertifikat dilakukan ketika uang yang beredar dimasyarakat berlebih maka dengan itu jumlahnya bisa

diminimalisir. Sedangkan pembelian surat-surat berharga diberlakukan ketika uang yang beredar dimasyarakat sedikit atau rendah maka dengan cara tersebut uang yang beredar dimasyarakat akan kembali normal.

Kedua, kebijakan diskonto (*discount policy*) yaitu suatu kebijakan dimana terjadi pengurangan dan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank umum. Apabila suatu kondisi dimana bank sentral telah memperhitungkan bahwasanya jumlah uang beredar telah mencapai atau melebihi kebutuhan (termasuk gejala inflasi), maka bank sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga dengan hal ini maka jumlah uang yang beredar dimasyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang.

Ketiga, kebijakan cadangan khas yaitu kebijakan yang berhubungan dengan *cash ratio*, dimana bank sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan yakni dalam menaikkan ataupun menurunkan cadangan khas atau yang sering kita sebut dengan *cash ratio*. Bank umum dalam keadaan ini akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun dalam hal ini adalah sebuah pengecualian yakni adanya persentase tertentu dari uang yang disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.

Keempat, kebijakan kredit ketat yang sesuai dengan namanya mengandung unsur ketat maka kebijakan satu ini berhubungan dengan pengawasan. Pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kredit ini

diberikan bank umum dengan beberapa syarat yakni karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan kondisi perekonomian. Hal ini sangat efektif ketika terjadi sebuah kekacauan disebuah negara, karena apapun alasannya semua pihak harus mentaatinya dan jika ada sebuah pelanggaran atau penyelewengan akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada.

Kelima, kebijakan dorongan moral (*moral situation*). Cara yang ditempuh oleh kebijakan ini adalah dengan pengumuman, pidato dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Pengumuman, pidato, dan edaran ini berisi tentang ajakan atau larangan dengan tujuan menahan pinjaman tabungan dan melepaskan pinjaman yang ada.²⁴

2. Tujuan Kebijakan Pemerintah

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno, yaitu dilihat berdasarkan pada dua tujuan yakni tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik.²⁵

1) Tujuan bersifat ekonomi

a. Menyediakan lowongan pekerjaan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus menerus. Dengan kata lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang usaha untuk mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah

²⁴ Ahmad Dian. “*Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi*”, diakses dari <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/instrumen-kebijakan-moneter>, pada tanggal 02 Mei 2018

²⁵ Qardhawiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)

penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus menerus. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius yaitu ketika berlaku kemunduran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin menurun bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita.

c. Memperbaiki pembagian pendapatan

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek buruk pada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan.

2) Tujuan yang bersifat sosial politik

a. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.

Apabila masalah yang timbul, keluarga tersebut mempunyai kemampuan terbatas akan melakukan pengeluaran. Maka secara langsung pengangguran akan mengurangi kemakmuran keluarga.

b. Menghindari masalah kejahatan

Disatu pihak pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaan. Akan tetapi di pihak lain, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Medan

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjalankan fungsi sebagai *Lender Of The Last Resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik balik berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral setelah terjadinya Konfrensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di *Den Haag* memutuskan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral. *De Javasche Bank* adalah sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (*Bank Of Issuing Money*) di Hindia-Belanda.

Kantor Bank Indonesia Medan (semula bernama kantor cabang Medan) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia merupakan kantor cabang *De Javasche Bank* yang ke-11. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Balai, dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia-Belanda (atas usul *De Javasche Bank*)

yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Medan dan adanya resesi dunia tahun 1930-an maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor cabang medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah didekat *Esplanade* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” karesidenan pantai timur sumatera. Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Bank Indoensia 1953

diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai.²⁶

Kemegahan Gedung Bank Indonesia Medan sampai saat ini masih bisa disaksikan. Bangunan ini tergolong mujur dalam hal kepemilikannya, karena Bank Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian bangunan tua yang dimilikinya meskipun bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2012.



Gambar 3. Logo Bank Indonesia

Sumber: www.bi.go.id

B. Visi dan Misi Bank Indonesia

1. Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Adapun yang menjadi visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui

²⁶ Bank Indonesia. “*Kajian Ekonomi Regional*”, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumut/profil/contenst/KBI.aspx>, pada tanggal 06 Maret 2018

pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, system pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

2. Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mempunyai misi yaitu mewujudkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian.²⁷

C. Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok dan produk satuan kerja, diantaranya sebagai berikut:

Tugas Pokok	Produk Pokok
Mengembangkan ekonomi daerah dan melaksanakan tugas fungsi advisor pada Kepala daerah.	Terlaksananya peran KPwDN sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dan advisor kepada Kepala Daerah.
Melaksanakan <i>Regional Financial Surveillance</i> .	Terlaksananya <i>Regional Financial Surveillance</i> .
Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan	Terkelolanya data yang efektif dan akurat dalam rangka mendukung

²⁷ Bank Indonesia. “*Profil Provinsi Sumatera Utara*”, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumut/profil/content/KBI.aspx> pada tanggal 02 Mei 2018

dipusat maupun daerah setempat.	pengambilan keputusan dipusat maupun daerah setempat.
Mengelola distribusi uang.	Terkelolanya distribusi uang didaerah secara efektif dan efisien.
Mengelola sistem pembayaran.	Terkelolanya dukungan sistem pembayaran didaerah serta terlaksananya peran KPwDN sebagai katalis dalam transaksi pembayaran melalui elektonifikasi.
Mengembangkan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM.	Terlaksananya program pengembangan <i>Financial Inclusion</i> dan UMKM didaerah yang sejalan dengan target pencapaian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah.
Melaksanakan Komunikasi Kebijakan.	Terlaksanya komunikasi kebijakan kepada <i>stakeholders</i> daerah secara efektif dan berkontribusi positif terhadap citra Bank Indonesia didaerah.
Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten.	Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten.

<p>Mengelola Administrasi anggaran, Logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajmenen Kinerja Satker.</p>	<p>Terkelolanya fungsi Administrasi anggaran, Logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen Kinerja Satker secara akuntabel serta transparan.</p>
--	---

Gambar 4. Tugas dan produk pokok Bank Indonesia

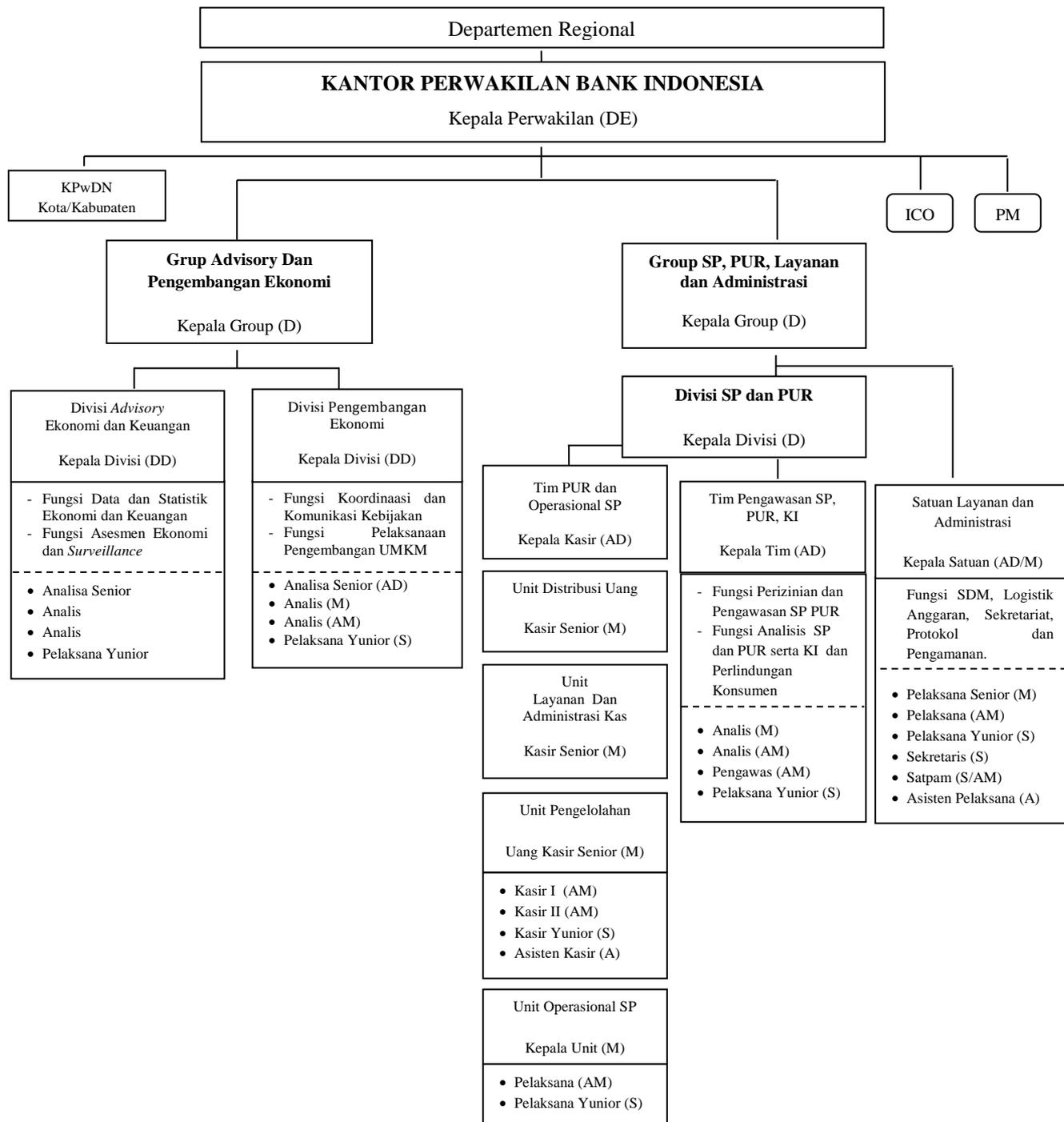
Sumber: Data Bank Indonesia

D. Struktur Oragnisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adapun struktur organisasi Bank Indonesia adalah berbentuk *staffing line*. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pimpinan tertinggi sampai kepada unit-unit dibawahnya sehingga tercipta suatu kesatuan perintah kesatuan komando.

Kantor Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Pemimpin yang dibantu oleh seorang Deputi Pemimpin. Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin Bank Indonesia Medan dan Kepala Grup dibantu oleh 3 (tiga) Tim dan 3 (tiga) Unit (bidang) yang masing-masing memimpin dan mengkoordinir beberapa kelompok/seksi dibawahnya.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA



Gambar 5. Struktur Organisasi KPwBI Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Data Bank Indonesia

E. Uraian Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Utara

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dijelaskan uraian tugas Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

1) Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan

a. Tim *Assessment* Ekonomi dan *Advisory*

Tugas dan tanggung jawab Tim *Assessment* Ekonomi dan *Advisory* :

- (1) Menyusun kajian Ekonomi Regional yang mencakup *assessment* makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga.
- (2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan.
- (3) Melakukan kajian *ad hoc* atas inisiatif KBI (Kantor Bank Indonesia) ataupun kerjasama dengan kantor pusat atau *stakeholders* daerah.
- (4) Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan *stakeholders* lainnya yang didasari oleh hasil penelitian.

b. Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tugas dan tanggung jawab Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah:

- (1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, manausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank.
- (2) Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi ekonomi, keuangan, perbankan dan demografi di wilayah kerja.

- (3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan pusat dan KBI (Kantor Bank Indonesia).
 - (4) Melakukan kegiatan *liaison* dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintahan, perbankan, dan asosiasi).
- 2) Divisi Pengembangan Ekonomi Daerah
- a. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan pengembangan UMKM:

- (1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian atau kesepakatan program yang potensial dalam pengembangan sektor riil.
- (2) Menyusun program pemberdayaan sektor riil (koperasi, BUMN, dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi.
- (3) Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan.
- (4) Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM (Usaha mikro kecil menengah).
- (5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil atau UMKM.
- (6) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM.

3) Divisi SP, Komunikasi dan Layanan Publik

a. Unit Komunikasi dan Layanan Publik

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Komunikasi dan Layanan Publik :

- (1) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis dan Kantor Pusat dalam rangka mengamplify komunikasi BI *Wide (One Voice)* termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan Komunikasi Satker KP di daerah
- (2) Melaksanakan dan menyusun program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya termasuk *customize* materi / publikasi eksternal
- (3) Melaksanakan *Networking* / jejaring dengan *stakeholder* daerah
- (4) Mengelola Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) termasuk Beasiswa
- (5) Memberikan layanan Informasi Publik (termasuk PPID)
- (6) Mengelola pelaksanaan kunjungan masyarakat termasuk Magang di Bank Indonesia
- (7) Mengelola perpustakaan Bank Indonesia

b. Unit Pengawasan, Perizinan dan Informasi SP

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Pengawasan, Perizinan dan Informasi

SP :

- 1) Melaksanakan dan mencabut izin penyelenggara Transfer Dana (TD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)
- 2) Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA

- 3) Melakukan perizinan terhadap Penyelenggaraan Layanan Kas oleh Pihak Lain (LKPL)
- 4) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara LKPL
- 5) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara *Cash In Transit* (CIT)
- 6) Melakukan perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kliring lokal non BI
- 7) Melakukan pemrosesan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kliring lokal non BI
- 8) Memberikan layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan sistem pembayaran di daerah

c. Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan Inklusif

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan Inklusif :

- (1) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi)
- (2) Melaksanakan program keuangan inklusif
- (3) Menjadi fasilitator program
- (4) Melakukan kajian program keuangan inklusif
- (5) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif

- (6) Menatausahakan rekening nasabah, kartu *specimen* tanda tangan, data kepesertaan SKNBI, data penarik cek / BG kosong, serta menerbitkan Daftar Hitam Nasional (DHN)
 - (7) Melakukan member *certification* kepada calon peserta dan peserta SKNBI
 - (8) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA dan RTGS)
 - (9) Memberikakn layanan kliring penyerahan debit / kredit dan kliring debit pengembalian
 - (10) Melakukan *backup* dan transaksi kliring
 - (11) Mengelola *Business Continuity Plan* (BCP) Penyelenggara Kliring
 - (12) Mengelola administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL
- d. Unit Distribusi Uang

Tugas dan Tanggung jawab dari Unit Distribusi Uang :

1. Melaksanakan Distribusi Uang
 - (1) Pengiriman Uang
 - (2) Penerimaan Uang
 - (3) Pengiriman Uang Kas Titipan
 - (4) Pengambilan Uang Kas Titipan
2. Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)
 - (1) Melaksanakan survei kebutuhan uang
 - (2) Menghitung EKU
 - (3) Memantau RDU
 - (4) Mengelola data statistik pengelolaan uang

e. Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas

Tugas dan Tanggung jawab dari Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas :

1. Memberikan Pelayanan Kas :

- (1) Penarikan bank
- (2) Setoran bank
- (3) Penukaran
- (4) Kas keliling
- (5) Penarikan nonbank
- (6) Setoran nonbank
- (7) Kas titipan
- (8) Penjualan uang rupiah khusus
- (9) Penjualan uang kertas asing (internal)

2. Administrasi dari Analisis Uang Palsu

- (1) Melakukan klarifikasi keaslian uang rupiah dari perbankan, masyarakat dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI)
- (2) Menganalisis dan mengatausahakan upal pada BICAC (BI *Counterfeit Analysis Center*)
- (3) Memberikan keterangan ahli

3. Administrasi, *Helpdesk* Setoran dan Penarikan Bank

- (1) Melakukan fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, TUKAB dan rencana penyetoran dan penarikan bank
- (2) Melakukan administrasi data perbankan

- (3) Analisis laporan proyeksi *cash flow* dan likuiditas uang kartal perbankan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan *supplies* :
 - (1) Membuat laporan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan kas
 - (2) Memberikan rekomendasi terkait perpanjangan kontrak pemeliharaan peralatan kas, pengenaan sanksi atau klaim (bila ada) kepada unit kerja terkait
 - (3) Memastikan perbaikan peralatan kas dan ketersediaan *supplies* kas.

f. Unit Pengolahan Uang

Tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Pengelolaan Uang :

1. Melaksanakan pengolahan uang
 - (1) Sortasi dan hitung ulang manual
 - (2) Sortasi uang dengan MSUK
 - (3) Pemusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) atau Peleburan Uang Logam
2. Melakukan pengelolaan Khasanah
 - (1) Pengambilan modal kerja
 - (2) Pengambalian modal kerja
 - (3) Menatausahakan titipan pada khasanah

4) Tim Satuan Layanan dan Administrasi

a. Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Logistik, Sekretaris dan Anggaran :

- (1) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- (2) Melaksanakan penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan asset
- (3) Memberikan dukungan logistik kepada unit kerja dan pegawai
- (4) Mengelola dokumen
- (5) Mengelola arsip
- (6) Mengelola kegiatan kesekretariatan
- (7) Mengelola anggaran
- (8) Mengelola pelaporan pajak

b. Unit SDM, Protokol dan Pengamanan

Tugas dan tanggung jawab dari Unit SDM, Pengamanan dan protokol :

1. Mengelola SDM Organik

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pegawai (*coaching* dan *cuonseling*)
- (2) Melaksanakan tugas pembayaran gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya bagi pegawai
- (3) Melaksanakan administrasi kepegawaian (absensi, cuti, izin, dan sebagainya)
- (4) Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purna tugas

2. Mengelola SDM Non-Organik seperti, penerimaan, penetapan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan berlaku
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi manajemen kinerja pegawai
4. Mengelola kegiatan keprotokolan
5. Mengelola kegiatan pengamanan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang sering dialami oleh suatu negara, khususnya Indonesia. Inflasi adalah penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dampak yang ditimbulkan sangat luas dan berakibat fatal. Oleh karena itu inflasi selalu dijadikan target pemerintah untuk bisa menstabilkan inflasi, karena dampak yang ditimbulkan pada perekonomian bisa berakibat seperti ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat serta pengangguran yang tinggi.

Angka inflasi sebagai salah satu indikator untuk stabilitas ekonomi selalu menjadi pusat perhatian tersendiri bagi para pelaku ekonomi. Jika tingkat inflasi yang tinggi sudah pasti akan membawa dampak yang merugikan bagi suatu negara. Keadaan perekonomian yang tidak menguntungkan (buruk) telah memacu tingkat inflasi yang tinggi dan akan menjadi malapetaka bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas pada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Berikut ini adalah data mengenai inflasi selama dua tahun penuh dari bulan Januari 2016 hingga pada bulan Desember 2017.

Bulan dan Tahun	Tingkat Inflasi	Bulan dan Tahun	Tingkat Inflasi
Januari 2016	4,14 %	Januari 2017	3,49 %
Februari 2016	4,42 %	Februari 2017	3,83 %
Maret 2016	4,45 %	Maret 2017	3,61 %
April 2016	3,60 %	April 2017	4,17 %
Mei 2016	3,33 %	Mei 2017	4,33 %
Juni 2016	3,45 %	Juni 2017	4,37 %
Juli 2016	3,21 %	Juli 2017	3,88 %
Agustus 2016	2,79 %	Agustus 2017	3,82 %
September 2016	3,07 %	September 2017	3,72 %
Oktober 2016	3,31 %	Oktober 2017	3,58 %
November 2016	3,58 %	November 2017	3,30 %
Desember 2016	3,02 %	Desember 2017	3,61 %

Gambar 6. Data inflasi pada dua tahun terakhir

Sumber: www.bi.go.id

Pada awal tahun 2016, tepatnya bulan Januari tingkat inflasi diawali dengan persentase yang bisa dikatakan tinggi yakni 4,14%. Kemudian mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada bulan Februari menjadi 4,42%, kenaikan tersebut tak berhenti sampai bulan Maret yakni 4,45%. Dan kemudian mengalami penurunan sampai bulan Mei yakni 3,33%. Namun, pada bulan Juni inflasi mengalami kenaikan lagi menjadi 3,45%. Pada bulan Juli dan Agustus inflasi kembali mengalami penurunan yang cukup baik yakni 2,79%. Kemudian

mengalami kenaikan yang signifikan sampai pada bulan November dan akhirnya mengalami penurunan pada bulan Desember menjadi 3,02%. Kenaikan inflasi pada titik paling tinggi terjadi pada bulan Maret yakni 4,45%. Sedangkan titik inflasi paling rendah terjadi pada bulan Agustus yakni 2,79%.

Pada tahun 2017, tingkat kenaikan inflasi tidak terlalu berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Di bulan Januari 2017 titik persentase inflasi berada pada 3,49% yang mengalami kenaikan dari bulan Desember 2016. Kemudian pada bulan Februari mengalami kenaikan lagi menjadi 3,83%. Dan inflasi mengalami penurunan pada bulan Maret menjadi 3,61%. Namun pada bulan April kembali mengalami kenaikan yakni 4,17% hal ini terjadi sampai bulan Juni yakni 4,37%. Kemudian pada bulan Juli sampai bulan November inflasi mengalami penurunan, dan pada bulan November inilah titik inflasi paling rendah selama tahun 2017 yakni 3,30% sebelum akhirnya mengalami kenaikan lagi pada bulan Desember menjadi 3,61%.

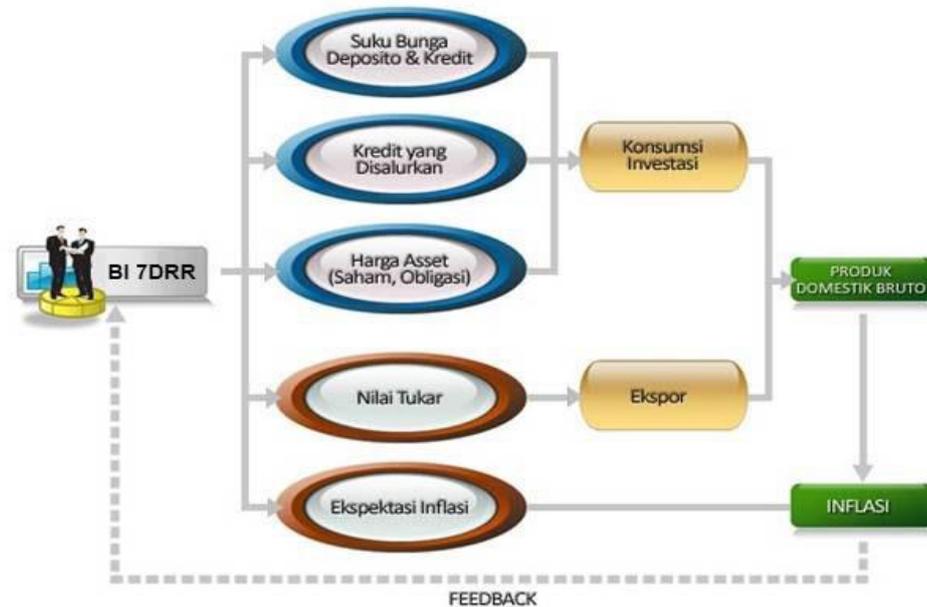
2. Mekanisme Bank Indonesia Dalam Melakukan Stabilitas Perekonomian

Kerangka strategis kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral banyak dipengaruhi oleh keyakinan bank sentral yang bersangkutan terhadap suatu proses tertentu mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Proses yang dimaksud sering dikenal dengan sebutan mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang

rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*). BI 7DRR (*BI 7-Day Repo Rate*) adalah kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia jika *BI-rate* naik agar lembaga perbankan bisa menepatkan dana mereka di BI selama tujuh hari saja (atau 14 hari, 21 hari, dan seterusnya). Jika dibulan berikutnya *BI 7-day rate* turun, maka pihak bank akan bisa langsung menarik dananya dan menyalurkannya ke masyarakat dan tidak harus menjadikan dananya mengendap di BI selama bertahun-tahun.

Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai *variable* ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui antara interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI 7DRR mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.



Gambar 7. Jalur transmisi kebijakan moneter

Sumber: www.bi.go.id

Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI7DRR untuk menahan aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapat tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah akan mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri akan menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (*time lag*). Time lag masing-masing jalur berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga pada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat resiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu di respon dengan menaikkan penyaluran kredit. Disisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu di respon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.²⁸

B. Pembahasan

1. Hubungan Inflasi Dengan Kestabilan (Pertumbuhan) Ekonomi

Hubungan inflasi dengan perekonomian sangat berpengaruh bagi masyarakat, dan pada negara itu sendiri. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi dibawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya

²⁸ Bank Indonesia. “*Transmisi Kebijakan Moneter*”, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/content/default.aspx>, pada tanggal 15 Maret 2018

pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha lebih banyak mendapat keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu terjadinya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%.

Begitu pula dengan produksi, dalam suatu perekonomian hasil produksi juga berpengaruh dikarenakan inflasi, yakni hasil produksi akan meningkat jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat dari pada kenaikan gaji atau upah pekerja. Hal ini akan memberikan keuntungan pengusaha menjadi lebih tinggi. Peningkatan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha akan mendorong pengusaha memproduksi lebih banyak sehingga hasil produksi pun meningkat.

Hasil produksi akan menurun jika inflasi sudah terlalu tinggi (hiperinflasi). Ketika terjadi hiperinflasi masyarakat tidak suka memiliki uang tunai, karena nilai uang riil yang dipegang menjadi semakin rendah. Daya beli uang menjadi rendah. Karena sebagian masyarakat tidak memegang uang tunai, sebagian pertukaran cenderung dilakukan dengan cara barter. Hal ini membuat produsen tidak bersemangat memproduksi sebab hasil produksi akan kurang laku, dan akibat selanjutnya hasil produksi pun akan turun.

2. Bank Indonesia Dalam Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Terhadap Inflasi

Guna untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia diberi kewenangan oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 23

tahun 1999 yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yakni, dengan melakukan operasi pasar terbuka dengan memperjual-belikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki oleh Bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Kebijakan moneter juga diterapkan dengan meningkatkan suku bunga diskonto. Tingkat suku bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan bank umum. Proses dari cara ini ialah, dengan asumsi yang sama bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Dengan suku bunga yang tinggi maka bank umum tidak akan meminjam uang dari Bank Indonesia dengan jumlah yang banyak. Sehingga uang yang ada di bank umum juga menjadi sedikit, sehingga uang yang tersalurkan ke masyarakat juga sedikit. Dengan demikian uang yang beredar menjadi tidak banyak lagi.

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, yakni dengan menjaga kelancaran sistem pembayaran di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengeluarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Dalam memelihara kestabilan nilai rupiah, dan menjaga inflasi agar tetap stabil dan harga pangan tetap terjangkau, di dalam perekonomian Bank Indonesia berupaya agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap provinsi akan membantu di setiap daerah di Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka agar tidak terjadi kelangkaan suatu bahan pangan dan menyebabkan dan menyebabkan harga naik, dan mempengaruhi harga bahan lain naik sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Hal itu merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. *Pertama*, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, penurunan tingkat diskonto, pengawasan kredit yang berkaitan dengan *cash ratio*, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. *Kedua*, Bank Indonesia melakukan pengendalian inflasi melalui transmisi kebijakan moneter dengan menerapkan sistem *BI-7 Day Repo Rate* (BI-7DRR). Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya. Mekanisme tersebut terjadi melalui antara interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan ujung tombak dari tercapainya stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dengan efektivitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menggunakan instrumen-instrumen yang dimilikinya, maka kestabilan moneter dan sistem keuangan sejatinya akan dapat dicapai. Dengan pencapaian tersebut, maka yang diharapkan adalah inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang bergerak tumbuh dan pesat. Dengan

itulah maka perekonomian Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang dan yang lebih penting adalah tercapainya stabilitas atas sektor moneter dan keuangan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, baik pemerintah maupun Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia, harus bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan dalam mengambil kebijakan yang berakibat krisis moneter dan inflasi yang tinggi, yang tentunya berdampak buruk bagi perekonomian dan buruknya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1996. *Teori Ekonomi Mikro Dan Makro Lanjutan*. Jakarta: PT Raja
Granfindo Persada
- BI, Biro Hubungan Masyarakat. 2003. *Peran BI Dalam Pengendalian Inflasi*.
Jakarta: 2003
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta:
Pranadamedia Group
- Indonesia, Gerai Info Bank. Juni 2015. *Benang Merah 2015 edisi 57*.
- M. Ridwan. 2013. *Ekonomi Pengantar Mikro Dan Makro Islam*. Bandung:
Citapustaka Media
- Mankiw, Grebrory N. 2001. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha
Ilmu
- Perbankan, Buletin Ekonomi Moneter. 2016. *Pengukuran Inflasi Inti (Core
Inflation) Di Indonesia*
- Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: Ghalia
Indonesia
- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia
Indonesia
- Putong, Iskandar. 2010. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Qardhawiy. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press

Samuelson, Paul A. 1993. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Yanti, Meita Nova. 2016. *Jurnal Ekonomi Bisnis: Faktor-faktor yang*

Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. Vol. 21 No. 3. Depok: Universitas

Gunadarma

daftar pustaka bersumber dari website:

Biz, Ardra. “*Indikator Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara*”, diakses dari

<https://ardra.biz/ekonomi-makro/indikator-pertumbuhan-ekonomi-suatu-negara/>

Dian, Ahmad. “*Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi*”, diakses dari

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/instrumen-kebijakan-moneter>

Indonesia, Bank. “*Disagregasi Inflasi*”, diakses dari

<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/contenst/disagregasi.aspx>.

Indonesia, Bank. “*Kajian Ekonomi Regional*”, diakses dari

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumut/profil/contenst/KBI.aspx>

Indonesia, Bank. “*Pengenalan Inflasi*”, diakses dari

<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/contenst.default.aspx>

Indonesia, Bank. "*Profil Provinsi Sumatera Utara*", diakses dari

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumut/profil/contenst/KBI.aspx>

Indonesia, Bank. "*Transmisi Kebijakan Moneter*", diakses dari

<https://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/contenst/default.aspx>

Rahmani, Ani. "*Faktor Penyebab Terjadinya Inflasi*". Diakses dari

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/faktor-penyebab-terjadinya-inflasi/>

Statistik, Badan Pusat. "*Inflasi*", diakses dari

<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Huta Baringin, kec. Siabu, kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1997, putri dari pasangan suami istri (alm.) H. Sahnun Nasution dengan Hj. Fatimah, S.Pd.I, anak ke empat dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009 di SD Negeri No. 14359 Huta Baringin, kec. Siabu, Mandailing Natal. Tingkat SMP di MTsN Panyabungan pada tahun 2012, dan pada tingkat SMA di MAN Panyabungan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tahun 2015.

Di UIN Sumatera Utara, penulis duduk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah kelas C, dan saat ini tengah menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya D-III di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 07 Mei 2018

NAZLY DAYANTY NASUTION